

TESIS

**POLITIK HUKUM KETERLIBATAN ANGGOTA POLRI AKTIF
DALAM JABATAN PEMERINTAH**



Disusun Oleh:

FERNANDA DE JESUS M. MAIA

NIM : 12124105

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2026**

TESIS

POLITIK HUKUM KETERLIBATAN ANGGOTA POLRI AKTIF DALAM JABATAN PEMERINTAH

**Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah Direvisi

PADA TANGGAL 4 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing :


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama


Dr. M. Akhul Huda S.H., M.H.



TESIS

PADA TANGGAL : 10 FEBRUARI 2026

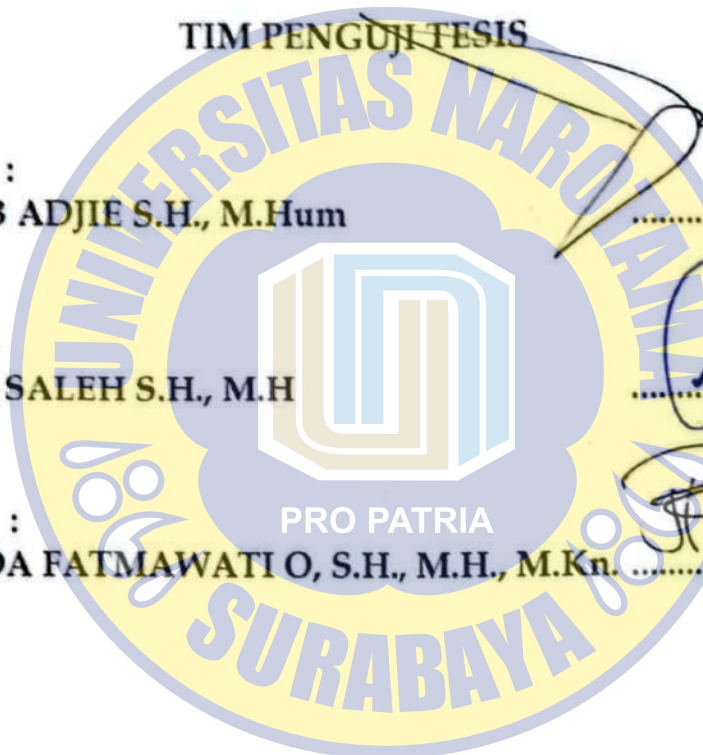
TIM PENGUJI TESIS

Ketua :
Dr. HABIB ADJIE S.H., M.Hum

Anggota :
Dr. MOH. SALEH S.H., M.H

Anggota :
Dr. NYNDA FATMAWATI O, S.H., M.H., M.Kn.

PRO PATRIA



Handwritten signatures of the three members of the Tesis Review Team (TIM PENGUJI TESIS) are present on the right side of the page, corresponding to the names listed on the left. Each signature is written in blue ink and is positioned over a dotted line.

LEMBAR PERSETUJUAN

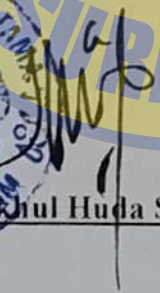
TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL: 10 Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing:


Dr. Moh. Saleh S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama


Dr. Miftakhlul Huda S.H., M.H.

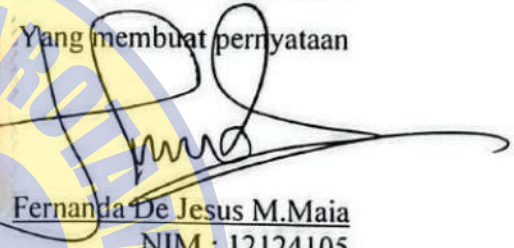
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan/ Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan


Fernanda De Jesus M. Maia
NIM : 12124105



ABSTRAK

Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan kesempatan bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan anggota aktif tidak dapat mengisi di posisi sipil tanpa mengundurkan diri atau pension. Adanya kesempatan bagi Polri untuk masuk pada jabatan sipil dapat berpotensi mencederai semangat konstitusi yang sebelumnya telah diatur pada masa Orde Baru. Tujuan penelitian adalah menganalisis tujuan negara yang hendak dicapai dalam pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan menganalisis akibat hukum atas pengisian jabatan pemerintahan dari anggota Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Tipe penelitian adalah yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian berbasis undang-undang dan pendekatan konseptual. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, sementara pengolahan bahan hukum melalui metode Milles & Huberman. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian membuktikan tujuan negara dalam pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah untuk memperkuat sinergi antara sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Akibat hukum atas pengisian jabatan pemerintahan dari anggota Polri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 adalah penyesuaian status hukum anggota Polri yang menjabat dalam pemerintahan dimana anggota polri yang sebelumnya menduduki jabatan pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan yang kini ditegaskan dalam putusan dianggap tidak sah secara hukum serta mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan terkait penunjukan dan pelaksanaan tugas anggota Polri dalam jabatan pemerintahan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Polri, Dampak Keterlibatan

ABSTRACT

The existence of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus which provides opportunities for members of the Indonesian National Police (Polri) to occupy civilian positions contradicts Law Number 2 of 2002 which states that active members cannot fill civilian positions without resigning or retiring. The opportunity for Polri to enter civilian positions can potentially harm the spirit of the constitution that was previously regulated during the New Order era. The purpose of this study is to analyze the state objectives to be achieved in regulating the involvement of Polri members in government positions based on Law Number 20 of 2023 and to analyze the legal consequences of filling government positions by Polri members after the Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025. The type of research is juridical-normative with a law-based research approach and a conceptual approach. The procedure for collecting legal materials is carried out through literature studies, while processing legal materials through the Milles & Huberman method. Analysis of legal materials is carried out using a descriptive analytical approach. The research results prove that the state's objective in regulating the involvement of Polri members in government positions based on Law Number 20 of 2023 is to strengthen the synergy between the security sector and government bureaucracy in order to support the effectiveness of state administration and public services. The legal consequences of filling government positions by Polri members after the Constitutional Court Decision Number 114 / PUU-XXIII / 2025 are adjustments to the legal status of Polri members who serve in government where Polri members who previously held government positions without fulfilling the requirements now emphasized in the decision are considered legally invalid and require a stricter and more transparent oversight mechanism regarding the appointment and implementation of Polri members' duties in government positions.

Keywords: Legal Politics, Police, Impact of Involvement

RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji politik hukum keterlibatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang munculnya permasalahan akibat perubahan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang membuka peluang bagi anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil tertentu. Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mensyaratkan anggota Polri aktif untuk mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Bab ini memuat rumusan masalah yang berfokus pada tujuan negara dalam pengaturan tersebut serta akibat hukum yang timbul pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diuraikan tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II Tujuan Negara Yang Hendak Dicapai Dalam Pengaturan Keterlibatan Anggota Polri Dalam Jabatan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menguraikan analisis terhadap arah kebijakan pembentuk undang-undang dalam memberikan ruang jabatan pemerintahan bagi anggota Polri. Pengaturan tersebut dipahami sebagai bagian dari politik hukum untuk memperkuat sinergi antara sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan guna mendukung efektivitas penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Namun demikian, dalam perspektif negara hukum dan supremasi sipil, kebijakan ini tetap harus memperhatikan prinsip netralitas aparatur negara, profesionalisme, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Bab III Akibat Hukum Atas Pengisian Jabatan Pemerintahan Dari Anggota Polri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 membahas implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penegasan batas konstitusional atas keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan. Putusan tersebut berdampak pada keabsahan pengangkatan anggota Polri yang tidak memenuhi persyaratan normatif, sehingga diperlukan penyesuaian status hukum dan penguatan mekanisme pengawasan dalam proses pengisian jabatan. Analisis dalam bab ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip demokrasi serta supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan atas keseluruhan hasil penelitian yang menegaskan bahwa pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis, serta disertai saran guna mewujudkan harmonisasi regulasi, kepastian hukum, dan penguatan mekanisme pengawasan agar tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia ilmu, pengetahuan, sehat dan waktu untuk bisa menyelesaikan Tesis yang berjudul “Politik Hukum Keterlibatan Anggota Polri Aktif Dalam Jabatan Pemerintah” dapat selesai dengan baik. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) Surabaya
3. Dr. Miftahul Huda S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama (UNNAR) Surabaya
4. Dr. Moh Saleh, S.H,M.H., Selakun Dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama proses pengerjaan Tesis ini.
5. Kedua orang tua serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis.
6. Semua teman Prodi Ilmu Hukum Universitas Narotama seangkatan yang telah bersama – sama dalam suka duka selama masa perkuliahan.
7. Semua pihak – pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang harus dilakukan dalam penulisan Tesis ini, maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis menerima segala masukan membangun. Akhir kata, semoga sedikit persembahan ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Surabaya, Februari 2026

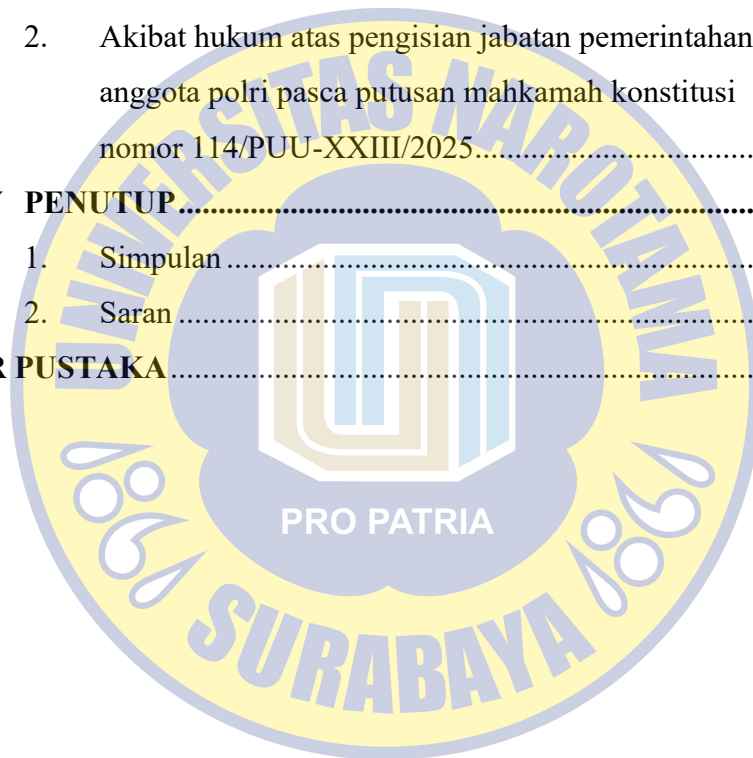
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
THALAMAN LEMBAR PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI TESIS.....	v
FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS	vi
FORM KESEDIAAN MEMBIMBING TESIS.....	vii
FORM PERSETUJUAN DEWAN TESIS.....	viii
SURAT PENUGASAN	ix
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL TESIS	x
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT	xii
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL.....	xiii
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN PROPOSAL TESIS	xix
KARTU KEHADIRAN MENGIKUTI PROPOSAL TESIS	xv
KARTU BIMBINGAN TESIS.....	xiii
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH	
SKRIPSI / TESIS	xviii
FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS	xviii
PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS.....	xx
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	xx
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
RINGKASAN	xxiii
KATA PENGANTAR.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR TABEL	xxviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
3.1 Tujuan Penelitian	8
3.2 Manfaat Penelitian	8
4. Orisinalitas Penelitian	10
5. Tinjauan Pustaka.....	12
5.1. Kepolisian Republik Indonesia.....	12
5.2. Politik Hukum.....	14
5.3. Reformasi Birokrasi.....	17
6. Metode Penelitian	21
6.1. Tipe Penelitian.....	21
6.2. Pendekatan Masalah.....	21
6.3. Sumber Bahan Hukum	22
6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	23
6.5. Analisis Bahan Hukum.....	25
7. Sistematika Penulisan	25
BAB II TUJUAN NEGARA YANG HENDAK DICAPAI DALAM PENGATURAN KETERLIBATAN ANGGOTA POLRI DALAM JABATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023	27
1. Kedudukan Hukum Polri dalam Perundangan sesuai Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023	27
2. Tujuan negara yang hendak dicapai dalam pengaturan keterlibatan anggota Polri dalam jabatan pemerintahan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023	35

BAB III AKIBAT HUKUM ATAS PENGISIAN JABATAN PEMERINTAHAN DARI ANGGOTA POLRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025.....	42
1. Pokok putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam pengisian jabatan pemerintahan dari anggota polri	42
2. Akibat hukum atas pengisian jabatan pemerintahan dari anggota polri pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 114/PUU-XXIII/2025.....	49
BAB IV PENUTUP.....	56
1. Simpulan	56
2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Anggota Polri yang menjadi pejabat pemerintah.....	5
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian	10

